

Kendalikan Banjir, Pemprov DKI Bangun Bak Kontrol

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menguras air dan membangun bak kontrol di beberapa titik untuk mengendalikan banjir di Jakarta. Terbaru, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta telah menyelesaikan pembangunan bak kontrol air di Jalan Ciledug Raya yang kerap terendam banjir. "Pembuatan bak kontrol ini menjadi salah satu upaya untuk mengatasi genangan," ujar Koordinator Lapangan Satuan Pelaksana SDA DKI Jakarta, Halim dalam keterangan resmi Pemprov DKI Jakarta, Rabu (10/1).

Menurut Halim, keberadaan bak kontrol air akan memudahkan proses pengurasan saluran di Jalan Ciledug Raya, Jakarta Selatan. Dengan begitu, saluran akan dapat bekerja maksimal untuk mengalirkan air ketika hujan deras dan tidak meluap. "Saluran air ini sebelumnya sulit dibersihkan karena tidak ada bak kontrol. Sehingga, kerap terjadi sumbatan yang terjadi memicu jalan tergenang," kata Halim.

Selain itu, jajaran Dinas SDA DKI Jakarta juga tengah melanjutkan pengurasan saluran air secara bertahap. Salah satunya di saluran air penghubung Pintu Air Kali Mookervart di kawasan Rawa Buaya, Jakarta Selatan.

"Saat ini pengurasan sudah dilakukan sepanjang 300 meter atau mencapai 80 persen," ujar Kepala Satpel SDA Kecamatan Cengkareng, John Tarigan.

Menurut John Tarigan, Dinas SDA DKI Jakarta menargetkan pengurasan saluran air di lokasi tersebut sampai 400 meter. "Tentu kami berharap dengan pengurasan dapat menambah daya tampung kapasitas air hujan sehingga bisa meminimalisir genangan," kata John.

Diberitakan sebelumnya, Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah, termasuk di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto menjelaskan, cuaca ekstrem dalam bentuk hujan lebat berpotensi terjadi pada periode 3-10 Januari 2024. "Berdasarkan analisis terkini, diidentifikasi hingga sepekan ke depan terdapat kondisi dinamika atmosfer yang memicu adanya potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah," ujar Guswanto saat dikonfirmasi, Kamis (4/1) lalu. Khusus wilayah Jabodetabek, kata Guswanto, berpotensi dilanda hujan lebat pada siang hingga sore hari selama sepekan ke depan. Dari hasil pemantauan BMKG, hujan lebat pada siang dan sore berpotensi melanda wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Depok, Kabupaten Bogor, serta Kota Bogor. "Kemudian di Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang bagian selatan, Kabupaten Bekasi bagian selatan," kata Guswanto. Selain siang hingga sore, hujan lebat juga berpotensi terjadi di Jabodetabek setiap malam sampai dini hari pada periode 3-10 Januari 2023.

Kondisi ini kemungkinan terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur bagian utara. Kemudian, Jakarta Barat bagian utara, Kabupaten Bekasi bagian utara, dan Kabupaten Tangerang bagian utara. "BMKG mengimbau kepada masyarakat dan instansi terkait agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem berupa hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang hingga sepekan ke depan," tutur Guswanto. ● yan

Kodim 0501/Jakarta Pusat Gelar Apel Kesiapsiagaan



JAKARTA (IM) - Komandan Kodim 0501/JP, Letkol Inf Bangun IE Siregar SH MIPOL, memimpin apel kesiapsiagaan dalam rangka Pemilu 2024 dan memberikan penekanan netralitas TNI menghadapi pemilu, bertempat di lapangan Makodim 0501/JP JL. Selaparang Blok B 11 Kav. 1, Kel. Gunung Sahari Selatan,

Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (9/1) lalu.

"Apel kesiapsiagaan ini bertujuan untuk mengecek langsung kesiapan anggota militer Kodim 0501/JP dalam pengamanan menghadapi berlangsungnya pemilu damai tahun 2024," ucap Dandim 0501/JP.

Pada kesempatan Apel Kesiapsiagaan, Letkol Inf Bangun IE Siregar SH MIPOL, menyampaikan kepada seluruh personel Kodim 0501/JP, sebagai aparat kewilayahan, kita harus selalu peka terhadap setiap perkembangan situasi maupun kondisi wilayah, apalagi Jakarta Pusat merupakan barometer politik nasional yang tentunya sangat lekat dengan berbagai macam perubahan," ucap Dandim 0501/JP.

Lebih lanjut, Dandim 0501/JP menekankan, "Untuk selalu menjunjung tinggi dan memegang teguh komitmen netralitas TNI dalam setiap kegiatan, jangan sekali-kali terlibat dalam politik praktis," pungkasnya. ● ber

4 Metropolis

IDN/ANTARA



SANTUNAN BAGI KORBAN GANGGUAN GINJAL AKUT

Menkes Budi Gunadi Sadikin (kanan) bersama Menko PMK Muhadjir Effendy memberikan keterangan pers usai pemberian santunan kepada korban gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (10/1). Pemerintah menyerahkan santunan kepada 312 keluarga korban gangguan ginjal akut yaitu untuk korban yang meninggal sebesar Rp50 juta per orang dan yang masih menjalani perawatan sebesar Rp60 juta per orang.

Pemprov DKI dan Jakpro Harus Lakukan Mediasi dengan Warga Kampung Bayam

Pemerintah harus membuka ruang mediasi dan mengutamakan pendekatan persuasif dalam hal ini demi kepentingan rakyat. Jakpro juga harus membuka dialog agar penyelesaiannya manusiawi. Jangan langsung pakai pendekatan hukum, salah benar. Harus ada jalan keluar yang baik untuk rakyat kecil.

JAKARTA (IM) - Pengamat kebijakan publik, Roy Valiant Salomo menyarankan Pemprov DKI dan PT Jakarta Property Group untuk menyelesaikan masalah Kampung Susun Bayam.

Pemerintah harus membuka ruang mediasi dan mengutamakan pendekatan persuasif dalam hal ini demi kepentingan rakyat. "Jakpro membuka ruang mediasi atau dialog agar penyelesaiannya

manusiawi. Jangan langsung pakai pendekatan hukum, salah benar. Harus ada jalan keluar yang baik untuk rakyat kecil," ujar Roy saat dihubungi, Rabu (10/1).

Ia menjelaskan, penegakan hukum memang penting. Namun, dalam penyelesaian konflik antara Jakpro dengan warga eks Kampung Bayam, tujuan utama yang harus dicapai yakni memberikan solusi terbaik bagi warga.

"Jadi baik cara maupun

tujuannya haruslah mengacu pada kepentingan rakyat, bukan sekadar penegakan hukum walupun penegakan hukum tentunya juga penting. Selain itu, baik Jakpro maupun Pemprov DKI harus bersikap transparan terkait nasib warga. Selama ini, warga tidak terinformasikan dengan baik penyebab Kampung Susun Bayam belum dapat dihuni oleh warga.

Selain itu, Pemprov DKI dan Jakpro juga harus menjelaskan rencana pengelolaan jangka panjang Kampung Susun Bayam. "Ya tentu saja, transparansi dan respek serta 'trust' terhadap rakyat itu syarat berdiskusi," tandasnya. Sebelumnya, PT Jakpro mempolisisikan warga eks Kampung Bayam yang menempati secara paksa Kampung Susun Bayam. Kampung Susun Bayam didirikan di dekat Jakarta International Stadium (JIS) dan diresmikan

oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kala itu, Anies berjanji merelokasi warga yang telah lama ting-

gal di Kampung Bayam ke Kampung Susun Bayam apabila pembangunan JIS telah selesai. ● yan

DKI Jakarta Mulai Buka Posko Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Posko Bersama Pemilu 2024 di seluruh wilayah DKI Jakarta diluncurkan serentak pada Selasa (9/1). Peluncuran serentak itu dipimpin oleh Asisten Pemerintah Sekda DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko. Secara total, ada 267 Posko Bersama Pemilu 2024 di tingkat kelurahan, 44 posko di tingkat kecamatan dan 5 posko di tingkat kota, serta 1 posko tingkat kabupaten.

Asisten Pemerintah Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan, mengungkapkan khusus di Jakarta Timur, ada 76 posko pemilu yang tersedia. "Jadi Posko Bersama Pemilu 2024 di Jakarta Timur akan kita optimalkan fungsinya dalam rangka penanganan pengaduan bersama Satpol PP, Bawaslu dan KPU Jakarta Timur, supaya betul-betul terkolaborasi dalam penanganan pelayanan kepada masyarakat terkait pemilu," kata Eka dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).

Sementara itu, Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jakarta Timur, Handoko Murhestiarso, menjelaskan sesuai instruksi Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, keberadaan Posko Bersama Pemilu 2024 dilakukan agar permasalahan di wilayah bisa disrespon cepat, dan dijawab serta diselesaikan dengan baik.

"Jadi karena di Posko Bersama Pemilu 2024 di wilayah sudah ada beberapa perwakilan

baik dari BIN, TNI, Polri, Satpol PP, Bawaslu, KPU, dan tokoh masyarakat, sehingga apa pun permasalahan di wilayah dapat diselesaikan bersama. Saling berkolaborasi bersama sehingga tahapan Pemilu 2024 hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara di Jakarta Timur berjalan lancar, aman dan damai," jelasnya. Posko

yang sama juga didirikan di Jakarta Utara yang berada di Lobi Kantor Wali Kota Kota Jakarta Utara. Posko itu akan mulai dioptimalkan selama 52 hari untuk mengamankan pelaksanaan putaran pertama Pemilu 2024 yang berlangsung pada 9 Januari-29 Februari 2024.

"Posko Bersama Pemilu 2024 hadir sebagai bentuk fasilitas pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilu yang kondusif dan demokratis. Posko ini juga melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, unsur intelijen, dan masyarakat," jelas Sekretaris Kota Jakarta Utara, Abdul Khalit.

Ia berharap Posko Bersama Pemilu 2024 dapat berjalan lancar sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai posko layanan masyarakat terkait pemilu, menjadi sumber informasi pemilu, sebagai jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan penyelenggara pemilu.

Secara umum, tugas dari posko pemilu di antaranya sebagai sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan pemilu di wilayah, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, memberikan saran penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu, melaporkan informasi dan laporan pelaksanaan tahapan pemilu secara berjenjang.

"Terkait dengan petugas piket posko bersama yang disiagakan setiap harinya berjumlah 22 orang dan diatur dengan jadwal piket yang telah disusun oleh panitia. Untuk itu, mari bersama-sama kita sambut pemilu dengan sukacita, mengawal pelaksanaan pemilu, dan menjaga wilayah Jakarta Utara agar tetap kondusif," tambahnya. ● yan

Budi Nugraha Jadi Ketua Panitia Konferensi Provinsi PWI DKI Jakarta



JAKARTA (IM) - Budi Nugraha telah ditetapkan sebagai Ketua Panitia Konferensi Provinsi PWI DKI Jakarta dalam rapat pengurus harian dan seksi PWI Provinsi DKI Jakarta di Sekretariat PWI Provinsi DKI Jakarta, Selasa (9/1) sore.

Konferensi PWI Jaya untuk menetapkan ketua PWI Jaya periode 2024-2029 akan diselenggarakan Kamis (25/1). "Kita sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman di Diskominfor Pemprov DKI Jakarta. Mereka mempersiapkan tempat di Gedung Pemprov," ujar Pt Ketua PWI Jaya, Kesit Budi Handoyo, yang memimpin rapat pleno.

Dalam upayanya untuk menyelenggarakan agenda lima tahunan PWI Jaya, Budi Nugraha menyampaikan langkah awal yang akan diambil oleh panitia adalah melakukan konsolidasi antar anggota kepanitiaan.

"Kami akan segera mengadakan rapat untuk menentukan teknis verifikasi daftar pemilih tetap dan calon ketua PWI DKI Jakarta," ungkap

Budi Nugraha, yang akan dibantu oleh Tubagus Adhi sebagai wakil ketua.

Budi Nugraha menjelaskan bahwa pemilihan pemilih dan calon ketua akan ditetapkan oleh tim verifikasi dari PWI Pusat paling lambat satu bulan sebelum hari pemilihan Ketua PWI Jaya. "Penerimaan daftar tetap pemilih dan calon ketua PWI DKI Jakarta harus dilakukan sebelum tanggal 20 Maret 2024, ini untuk memastikan kelancaran proses pemilihan tanpa adanya kesimpang-siuran," tambah Budi Nugraha.

Selain itu, Panitia Konferensi juga akan mengumumkan kriteria hak untuk memilih yang mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan. "Calon ketua harus pemegang kartu UKW Utama, namun tidak ada pembatasan bagi siapa pun yang ingin maju sebagai ketua PWI DKI Jakarta," tegasnya.

Budi Nugraha memberikan saran kepada calon pemilih yang masih memproses perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA) Biasa PWI, agar segera menyelesaikannya

sebelum batas waktu yang ditentukan.

"Calon pemilih yang kartunya masih dalam proses perpanjangan dapat menyelesaikannya hingga 20 Maret. Namun, di luar waktu tersebut atau sebelum diumumkan oleh PWI Pusat, kami tidak dapat melayani sebagai pemilih untuk menghindari potensi kecacauan," jelasnya.

Budi Nugraha juga mengimbau agar calon pemilih segera mengurus perpanjangan kartu agar dapat ditetapkan sebagai pemilih tetap.

"Kami berharap calon pemilih dapat menyelesaikan perpanjangan kartu sebelum batas waktu yang ditentukan, yakni satu bulan sebelum hari pemilihan," terang Budi Nugraha.

Rapat Pleno PWI Jaya juga membahas sejumlah kegiatan yang akan dilakukan pada 2024. Di antaranya, turnamen golf untuk memeriahkan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) PWI Jaya, pemberian bantuan sosial untuk kaum duafa, dan Anugerah Jurnalistik Mohammad Husni Thamrin. ● ber

PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (8) juncto ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan ini Direksi PT. Euthenia Gerak Abadi, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan") mengumumkan bahwa Perseroan akan melakukan akuisisi sejumlah 19.136 (sembilan belas ribu seratus tiga puluh enam) lembar saham di dalam PT. Tata Buana Selaras langsung dari pemegang saham. Rencana Pengambilalihan tersebut akan mengakhiri secara bertahap pengelolaan Perseroan dan akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditur atau pihak ketiga lainnya yang ada kaitannya dengan Perseroan tersebut dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Kuasa Hukum Perseroan dengan alamat:

SAPTA CONSULTANT
Jalan P. Tirtayasa No. 200
Sukabumi, Bandar Lampung
Email : tatabuanselaras@gmail.com
085717566227

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 11 Januari 2024
PT Euthenia Gerak Abadi
Direksi

PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 8

PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 8 ("Manajer Investasi") dengan ini mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 8 ("SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 8").

Pembubaran SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 8 dilakukan sehubungan dengan terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Ber bentuk Kontrak Investasi Kolektif JIS. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Ber bentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Ber bentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang menyatakan bahwa SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 8 wajib dibubarkan apabila dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 8 memiliki total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), yang jatuh pada tanggal 10 Januari 2024.

Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pada tanggal yang sama dengan pengumuman ini, Manajer Investasi telah menyampaikan rencana pembubaran SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 8 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 8 efektif per tanggal 11 Januari 2024.
- Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan ditanjangkannya akta pembubaran SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 8 yang dibuat di hadapan notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

SYAILENDRA Jakarta, 11 Januari 2024
Manajer Investasi selaku likuidator
REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 8
PT Syailendra Capital
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan